

Persepsi Remaja Terhadap Kesetaraan Gender Berdasarkan Nilai Ideologi Pancasila

Fina Cahyani¹, Nadila Carbela², Ryan Fadli Al Rizky³, Shafa Azahra Rabbani⁴,
Ziyaan Kireina Syaihan Shofiyani⁵, Supriyono⁶

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Indonesia

⁶ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: Finacahyani@upi.edu

Abstrak

Kesetaraan gender sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di kalangan remaja yang sedang membangun identitas dan cara berpikir mereka sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi remaja terhadap kesetaraan gender dipengaruhi oleh nilai-nilai pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa nilai-nilai seperti keadaan sosial dan kemanusiaan memengaruhi cara remaja melihat kesetaraan gender. Sebagian besar remaja menunjukkan kesadaran Meskipun pentingnya peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, namun masih terdapat tantangan berupa stereotip budaya. Studi ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis pancasila sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender.

Kata kunci : *Remaja, Kesetaraan Gender, Nilai, Ideologi, Pancasila*

Abstract

Gender equality is an important social problem, particularly for adolescents who are forming their identities and perspectives. The objective of this study is to investigate how adolescents see gender equality in light of the ideological underpinnings of Pancasila, Indonesia. The results of a qualitative study show that teenagers' opinions on gender equality are influenced by pancasila principles like social justice and humanity. Although cultural preconceptions continue to be a challenge, the majority of adolescents understand the significance of equal roles for men and women. The significance of pancasila-based education in enhancing comprehension of gender equality is highlighted by this study.

Keywords : *Remaja, Kesetaraan Gender, Nilai, Ideologi, Pancasila*

PENDAHULUAN

Gagasan dasar, tujuan, dan keadilan dan kesetaraan adalah tujuan utama peradaban manusia. Kesejahteraan adalah tujuan utama, membangun masyarakat dan negara yang harmonis, dan membentuk keluarga yang baik (Samaha et al., 2004).

Kesetaraan gender berarti politik, ekonomi, pendidikan, adalah hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini juga berarti bahwa mereka tidak boleh didiskriminasi karena jenis kelamin dan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan sosial (Asyifa & Najicha, 2023).

Salah satu prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kesetaraan gender. Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai ini, terutama silakelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, Sila Kelima Pancasila mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. Sila Kelima Pancasila menitikberatkan pada prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, tidak peduli jenis kelamin mereka. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara global (Khairunnisa, 2018).

Semua aspek Pancasila menegaskan pentingnya kesetaraan gender, termasuk sila kelima. Sebagai contoh, sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa, menekankan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan; sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak dapat dicapai tanpa melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara (Khoirunnisa et al., 2024)

Konsep kultural yang dikenal sebagai "gender" mencakup karakteristik yang membedakan pria dan wanita dalam hal perilaku, biologis, mental, dan sosial budaya. Laki-laki dan perempuan, yang muncul sebagai hasil dari proses sosial dan budaya. Mereka memiliki seksualitas, mentalitas, dan perilaku yang berbeda, tetapi peran mereka dalam masyarakat dapat sebanding dengan atasan tertentu. Karena perkembangan sosial, Helen Tierney menyatakan bahwa gender membedakan peran, perilaku, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan (Adolph, 2016).

Selama bertahun-tahun, debat tentang kesetaraan gender telah berkembang menjadi subjek utama dalam diskusi tentang perubahan sosial dan menjadi topik utama dalam diskusi tentang pembangunan dan perubahan sosial. Salah satu masalah penting yang sedang berkembang penelitian ini melihat bagaimana remaja Indonesia melihat kesetaraan gender. Gender atau jenis kelamin adalah salah satu hal yang sering dijadikan objek diskriminasi. Namun, jenis kelamin dan gender adalah konsep yang berbeda. Jenis kelamin bukan hanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan didefinisikan sebagai bentuk atau sesuatu yang terkait dengan karakteristik fisik dan fisiologis seseorang, seperti fungsi hormon, kromosom, gen, dan anatomi, reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, dan identitas gender yang dibangun di masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah konsep budaya yang bergantung pada bagaimana orang berperilaku dan bagaimana mereka dianggap sebagai orang.

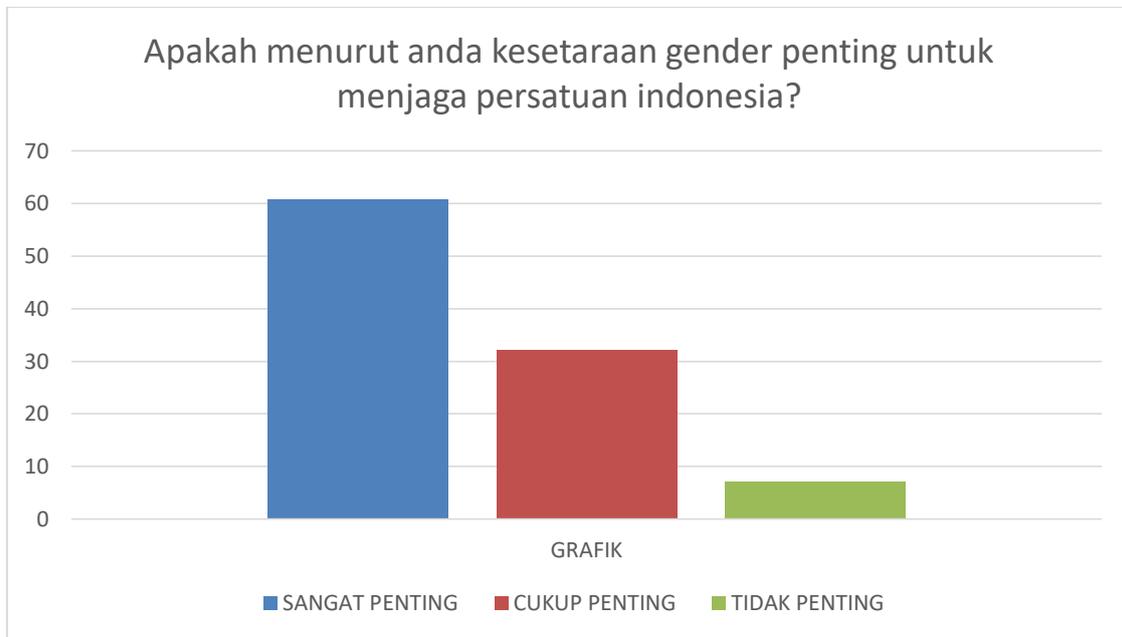
Selama bertahun-tahun, kesetaraan gender telah dianggap sebagai hak asasi manusia dan tujuan pembangunan yang lebih utama. 4. Dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga membuat konvensi. Salah satunya adalah Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) tahun 1979, yang telah disetujui oleh 189 negara, termasuk Indonesia. Indonesia menyetujui perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Mengenai persetujuan Konvensi Mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita. Sustainable Development Goals (SDGs) adalah program yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan kelima dari program itu adalah "Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan". Indonesia kemudian menandatangani program dan setelah itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup tujuan nasional yang didasarkan pada tujuan dan tujuan SDG saat ini.

METODE

Untuk melakukan penelitian Persepsi Remaja Terhadap Kesetaraan Gender berdasarkan nilai ideologi pancasila, sebagai peneliti, kami menggunakan pendekatan kualitatif karena setiap individu dan pendapat kelompok pasti berbeda. menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Proses penelitian dan pemahaman bergantung pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dan masalah manusia khusus. Studi literatur atau studi pustaka adalah jenis penelitian yang mengumpulkan, memperoleh, dan menghimpun informasi dari berbagai jurnal, Persepsi Remaja Terhadap Kesetaraan Gender Indonesia dengan mencatat studi pustaka, menganalisis data, dan mencatat poin penting hingga mencapai kesimpulan. Penelitian ini melibatkan responden dari para remaja, dan aktivis gender. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur yang berfokus pada pandangan mereka tentang kesetaraan gender berdasarkan nilai-nilai pancasila.

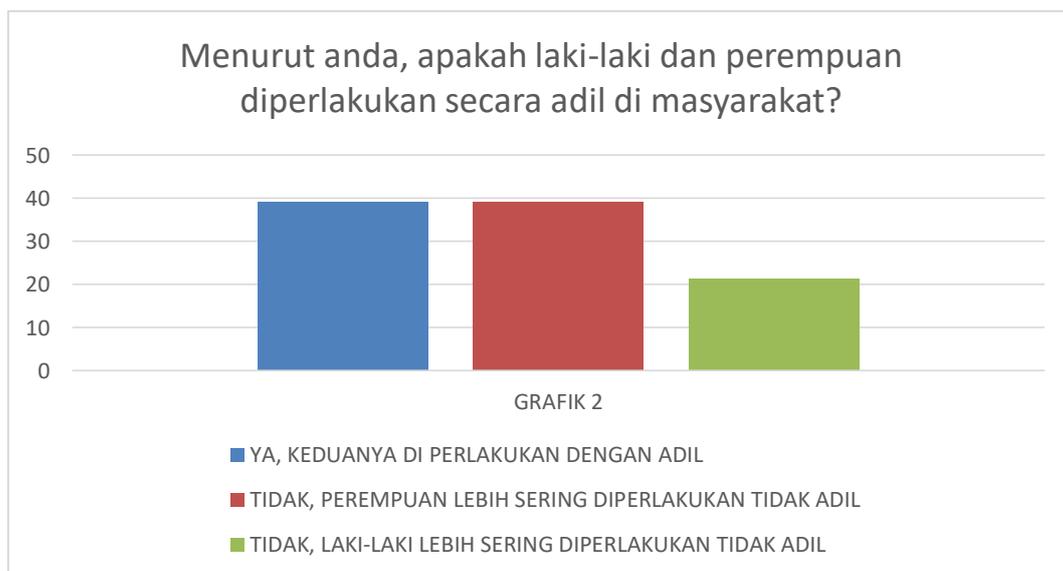
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data dari kuesioner yang telah diisi oleh 30 responden remaja. Kuesioner tersebut dirancang secara sistematis untuk mengukur persepsi remaja terhadap kesetaraan gender, dengan berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila. Persepsi remaja terhadap kesetaraan gender merupakan cerminan dari cara mereka memahami konsep keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila.



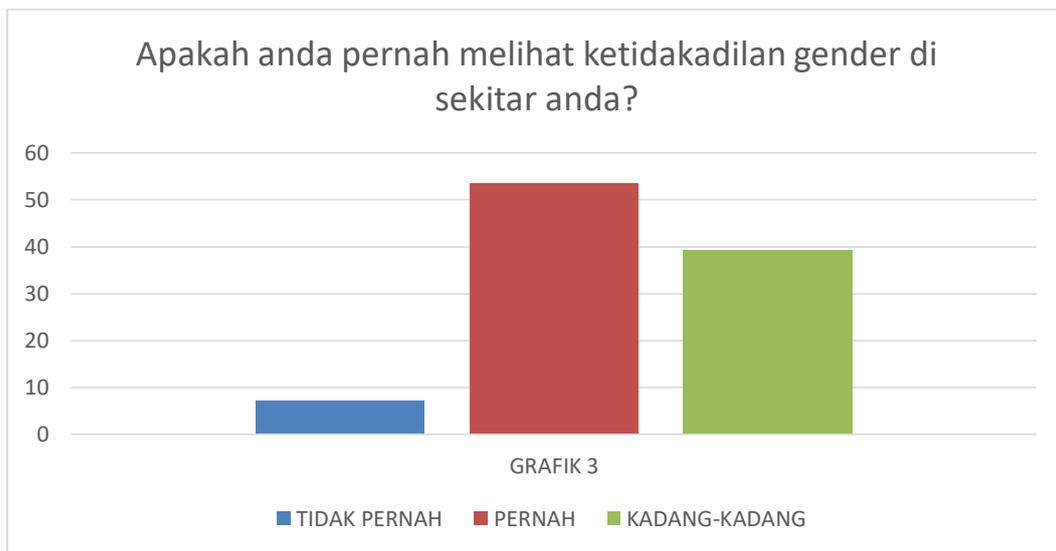
Gambar 1. Pentingnya Kesetaraan Gender

Data tersebut menyajikan bahwa pentingnya kesetaraan gender untuk menjaga persatuan Indonesia berdasarkan persepsi remaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memiliki persentase 60% responden setuju dengan pernyataan di atas. Terdapat beberapa faktor pendorong alasan remaja setuju dengan pernyataan pentingnya kesetaraan gender salah satunya yaitu adanya kesadaran hak asasi manusia, remaja semakin sadar bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.



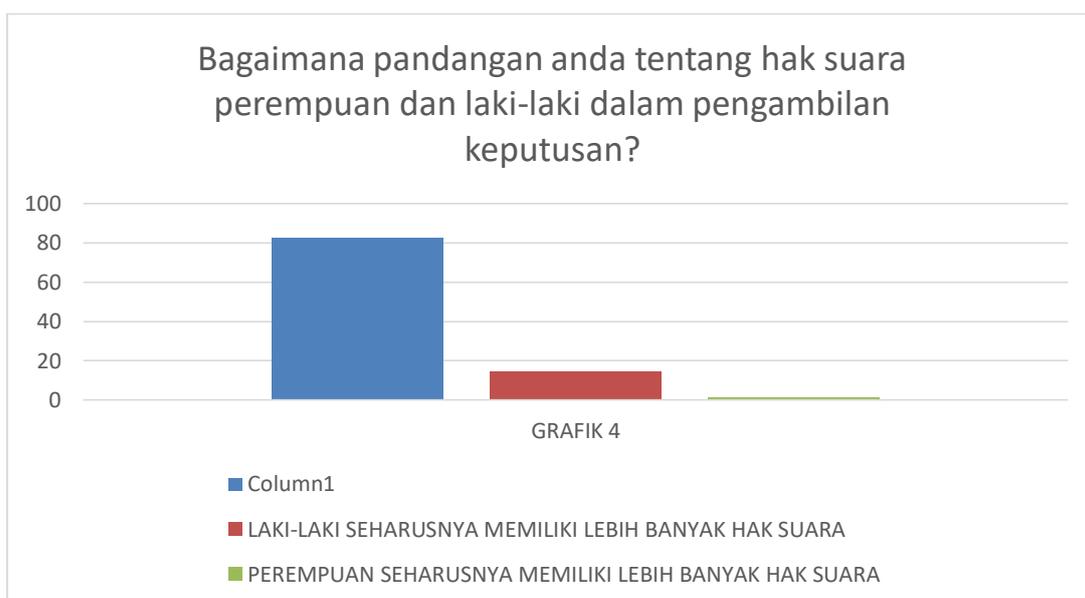
Gambar 2. Kesetaraan gender diperlakukan secara adil

Data tersebut menyajikan bahwa kesetaraan gender laki-laki dan Perempuan di masyarakat diperlakukan secara adil berdasarkan persepsi remaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memiliki persentase 39% setuju keduanya diperlakukan secara adil, 39% tidak, perempuan lebih sering diperlakukan tidak adil dan 22% tidak, laki-laki lebih sering diperlakukan tidak adil. responden setuju dengan pernyataan di atas. Terdapat beberapa faktor pendorong alasan remaja setuju dengan pernyataan pentingnya kesetaraan gender salah satunya yaitu, pengalaman pribadi atau lingkungan sosialnya, remaja mungkin memiliki pengalaman pribadi atau melihat orang terdekat yang menghadapi ketidakadilan berdasarkan gender, sehingga para remaja terdorong untuk mendukung perlakuan adil bagi semua.



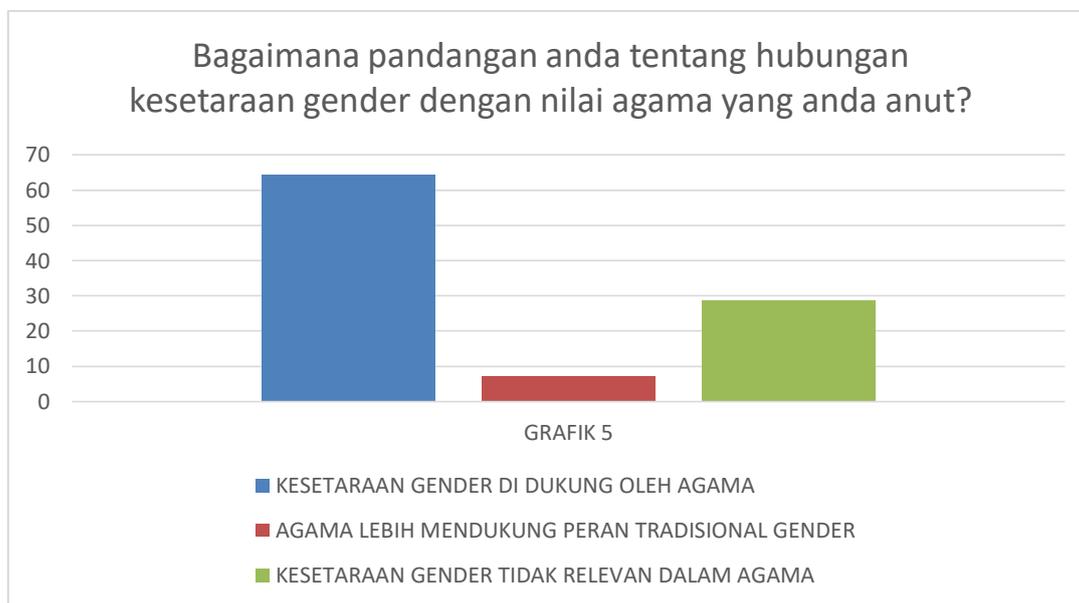
Gambar 3. Ketidakadilan gender

Data tersebut menyajikan bahwa untuk menjaga persatuan Indonesia berdasarkan persepsi remaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memiliki persentase responden setuju dengan pernyataan di atas. Terdapat beberapa faktor pendorong alasan remaja setuju dengan pernyataan pentingnya kesetaraan gender salah satunya yaitu, pentingnya keadilan sosial, karena kesetaraan gender dipandang sebagai bagian dari keadilan sosial yang dapat menjaga persatuan bangsa.



Gambar 4. Pandangan dalam pengambilan Keputusan

Data tersebut menyajikan bahwa berdasarkan persepsi remaja bahwa pandangan dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa faktor pendorong alasan remaja setuju dengan pilihan bahwa laki laki dan perempuan memilihi hak suara yang sama salah satunya yaitu, kesadaran akan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.



Gambar 5. Pandangan Kesetaraan Gender dengan nilai agama

Data tersebut menyajikan bahwa berdasarkan persepsi tentang pandangan kesetaraan gender dengan nilai agama memiliki persentase responden setuju dengan pilihan bahwa kesetaraan gender di dukung oleh agama. Terdapat beberapa faktor pendorong alasan remaja setuju dengan pilihan tersebut salah satunya yaitu, karena ajaran agama menekankan keadilan dan penghormatan terhadap sesama manusia.

Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan Pasal 6, yang menyatakan bahwa "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha", menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memastikan hak kerja yang sama bagi laki-laki dan perempuan di tempat kerja.

Dari 144 negara di seluruh dunia, Indonesia menempati urutan ke-84 karena kesenjangan gender yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa banyak perempuan Indonesia yang belum berpartisipasi dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Dari waktu ke waktu, perempuan masih mengalami diskriminasi, terutama di tempat kerja di mana mereka adalah bagian penting dari bisnis. Setiap perlakuan atau pengucilan yang merugikan pekerja disebut diskriminasi di tempat kerja. Kesenjangan upah gender adalah diskriminasi yang paling nyata di tempat kerja. Pekerja laki-laki biasanya menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Tingkat pendidikan dan keterampilan seorang pekerja mempengaruhi besarnya upah. Biasanya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan maka semakin tinggi upah tinggi pula gaji yang diperoleh. Pengalaman kerja juga dapat mempengaruhi kompensasi: Pekerja yang lebih berpengalaman cenderung memperoleh pengetahuan tambahan dan kemampuan yang dihargai oleh pempekerja, yang menghasilkan kenaikan gaji yang lebih besar. Industri dan posisi pekerjaan: Industri dan posisi pekerjaan seseorang pekerjaannya memengaruhi gajinya. Ada kemungkinan industri tertentu membayar tinggi dari industri lain, berdasarkan permintaan dan ketersediaan pekerja di industri tersebut. Lokasi Geografis: Lokasi geografis mempengaruhi kompensasi juga. Misalnya, upah biasanya lebih tinggi di kota atau daerah metropolitan dengan biaya hidup yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada di tempat yang lebih terpencil. Kondisi keuangan: Kondisi ekonomi nasional atau regional juga dapat

mempengaruhi gaji. Upah meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan banyaknya pekerjaan. *Negosiasi Gaji*: Kemampuan untuk berunding seseorang juga dapat berdampak gajinya. Orang yang memiliki kemampuan negosiasi efektif dan dapat mengkomunikasikan nilai yang mereka berikan kepada perusahaan mungkin besar akan menerima gaji yang lebih tinggi. Faktor tambahan: Beban kerja, Waktu kerja, peraturan, tingkat tanggung jawab, jam kerja, kebijakan kompensasi perusahaan, serta komponen lainnya dapat mempengaruhi gaji. Di Indonesia, budaya patriarki yang berakar kuat telah menyebabkan ketidaksetaraan gender. Laki-laki dipandang sebagai pihak yang paling berkuasa dan memiliki kontrol atas tanggung jawab kepemimpinan dalam hubungannya dengan perempuan dalam budaya patriarki ini. Selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender, atau kesenjangan gender, perbedaan gender tidak merupakan masalah. Namun, masalahnya adalah konstruk sosial yang dibangun dalam budaya yang didasarkan pada patriarki mengenai diskriminasi gender telah menghasilkan berbagai jenis ketidaksetaraan yang lebih sering terjadi pada perempuan (Susanto 2015).

Pada Agustus 2019, gaji rata-rata karyawan/pegawai adalah 2,91 juta per bulan. Laki-laki menerima gaji rata-rata yang lebih tinggi daripada wanita, tetapi gaji wanita kurang dari rata-rata nasional. Rata-rata gaji wanita hanya 2,45 juta rupiah per bulan, berbeda dengan rata-rata upah laki-laki 3,17 juta rupiah per bulan (BPS, 2019). Selisih gaji gender adalah masalah dengan signifikan yang mempunyai banyak dampak negatif bagi wanita. Ini dapat mengakibatkan masalah ekonomi, ketidakamanan, dan penurunan peluang. Ini juga dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Masalah terus-menerus di tempat kerja adalah ketidaksetaraan upah gender. Ada sejumlah alasan mengapa perempuan bergaji rata-rata sekitar dua puluh persen lebih rendah daripada laki-laki jika mereka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Faktor-faktor ini termasuk segregasi pekerjaan dan diskriminasi.

Meskipun upaya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan menikmati hasil dari restrukturisasi sistem hukum, yang mencakup materi hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum, kesetaraan gender tidak dapat dicapai jika keduanya diposisikan dengan adil dan tidak diskriminatif sebagai warga negara. Dalam situasi di mana syarat-syarat ini dapat diterima oleh masyarakat, hal itu menghasilkan apa yang disebut sebagai keadilan gender. Sebagai keadilan gender, karakteristik tertentu dalam sistem hukum negara, yang menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi gender dalam hal akses ke kesempatan, dan hak untuk mengontrol hasil yang telah diputuskan. Dilakukan oleh sistem hukum di negara tersebut. Sesuai dengan Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan, "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan" dan "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha" (Mirnayanti 2022).

Sebenarnya, masih banyak kasus kesalahan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penyimpangan ini mulai dari ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi terhadap perempuan yang bekerja di perusahaan. Hal ini didasarkan pada laporan yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan yang menunjukkan bahwa 90% kasus di mana wanita adalah subjek kekerasan seksual yang bekerja. Ini terjadi di Indonesia juga, di mana RA Kartini telah lama mengkampanyekan kesetaraan gender, yang menghasilkan emansipasi yang memungkinkan wanita mendapatkan pendidikan seperti pria (Riyanto 2023). Tindakan di berbagai tingkatan diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, termasuk tindakan individu, upaya organisasi, dan perubahan kebijakan (Angelina 2023).

Selain itu, pemerintah juga membuat undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan. Ketimpangan gender masih ada di Indonesia, meskipun ada upaya dari waktu ke waktu untuk menguranginya. Ada sejumlah sinyal yang menunjukkan bahwa negara telah maju menuju kesetaraan gender. Buktinya adalah jumlah perempuan yang mengambil bagian dalam pendidikan. Jumlah wanita Indonesia yang memiliki akses ke pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu. Banyak wanita memiliki kesempatan untuk kuliah dan bekerja di berbagai bidang. Tetapi, meskipun registrasi siswa perempuan telah berkembang, sulit untuk mempertahankan jumlah siswa sama di tingkat karir yang lebih tinggi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap kesetaraan gender sangat penting, khususnya dalam aspek pendidikan. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), berperan penting dalam membentuk pemahaman mereka terhadap pentingnya kesetaraan gender.

Namun, penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi kendala, seperti pengaruh budaya patriarki dan stereotip gender yang kuat di masyarakat. Faktor lingkungan, seperti pendidikan formal, keluarga, dan media sosial, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi remaja tentang kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *KESETARAAN GENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERILAKU SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SILA KELIMA PANCASILA*. 10(132), 1–23.
- Asyifa, Z., & Najicha, F. U. (2023). Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender di Era Industri 4.0. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 30–40. <https://core.ac.uk/download/pdf/578767227.pdf>
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Khoirunnisa, Rois, M. F. A. N., Nurudin, M. H., & Taun. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila. *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(1), 21–27. <http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/>
- Samaha, E., Meria, P., Hernigou, A., & Duclos, J. M. (2004). Non-secreting adrenal tumours. *Annales d'Urologie*, 38(1), 35–44. <https://doi.org/10.1016/j.anuro.2003.10.003>